

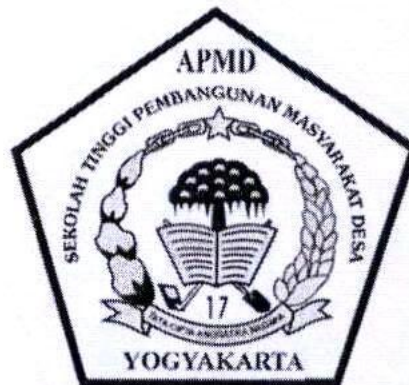
SKRIPSI

STRATEGI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DI DESA TANJUNG KERANJANG KECAMATAN MALINAU KOTA

KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Disusun Oleh:

JESITA APRILIA

18510040

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



SKRIPSI

STRATEGI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DI DESA TANJUNG KERANJANG KECAMATAN MALINAU KOTA

KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Disusun Oleh:

JESITA APRILIA

18510040

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

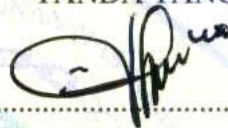
Hari : Jumat, 29 Juli 2022
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

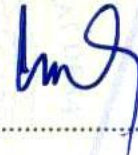
NAMA

TANDA TANGAN

Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A
Ketua Penguji/Pembimbing



Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si
Penguji Samping I



Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial



Dra. Oktavia Albizzia, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jesita Aprilia
NIM : 18510040
Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“STRATEGI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA TANJUNG KERANJANG, KECAMATAN MALINAU KOTA, KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA”** adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 4 Agustus 2022
Yang menyatakan



Jesita Aprilia
NIM 18510040

MOTTO

“Sekalipun kita memiliki masa-masa yang sulit, itu tidak akan ada apa-apanya jika kita lebih banyak merasakan kebahagiaan”.

(Jungkook)

“Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu”.

(Filipi 4: 9)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan bimbingan-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan skripsi saya persembahkan untuk semua orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Jesly Lagan dan Mama Berta Liling yang terkasih sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasihku kepada kalian, kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Mama yang selalu memberikan kasih sayang, selalu mendoakan, dukungan, motivasi, dan cinta kasih yang tak terhingga dan tak dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan ini, sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar sarjana (S-I) . Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi dimanapun Bapak dan Mama berada, serta dijauhkan dari segala yang jahat;
2. Untuk kakakku Herly Novita, dan adikku Rio P. Immanuel, karya ini kupersembahkan untuk kalian yang selalu memberi dukungan, semangat dan doa sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar sarjana (S-I). Tidak ada yang bisa kuberikan selain membalas dengan dukungan, semangat, dan doa dari kalian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi dimanapun Novi dan Rio berada, serta dijauhkan dari segala yang jahat;

3. Untuk Keluarga Besarku dari Kakek Liling Kasing dan Kakek Lagan Lalung, sahabat-sahabatku, terima kasih karena selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi untukku menyelesaikan studi ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi dimanapun kalian berada serta dijauhkan dari segala yang jahat;
4. Untuk Almamaterku Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dan teman-temanku dari Prodi Pembangunan Sosial Angkatan 2018, terima kasih atas kebersamaan kita kurang lebih 3 semester bersama, yang walaupun sisanya kita bertemu via daring namun tidak mengurangi rasa kebersamaan kita selama ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi dimanapun kalian berada serta dijauhkan dari segala yang jahat; dan
5. Untuk dosen pembimbingku Ibu Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A, terima kasih karena telah sabar dalam membimbing dan mengajarkanku dengan segala kebaikan hati ibu, mungkin skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melindungi dimanapun ibu berada serta dijauhkan dari segala yang jahat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di kemudian hari. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Ibu Dra. Oktarina Albizzia, M.Si selaku Ketua Prodi Pembangunan Sosial;
3. Ibu Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi;
4. Ibu Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si. selaku Dosen Penguji Samping I yang telah menguji, memberikan saran masukan kepada penulis dalam ujian skripsi;

5. Ibu Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si selaku Dosen Penguji Samping II yang telah menguji, memberikan saran masukan kepada penulis dalam ujian skripsi;
6. Seluruh Dosen Prodi Pembangunan Sosial dan civitas akademika STPMD “APMD” Yogyakarta;
7. Kepala Desa dan PKK Desa Tanjung Keranjang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
8. Seluruh warga Desa Tanjung Keranjang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini; dan
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 4 Agustus, 2022

Penulis

Jesita Aprilia

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
1. Konsep Pemberdayaan Perempuan.....	10
2. Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	15

E. Fokus Penelitian.....	19
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Objek Penelitian.....	21
3. Subjek Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Teknik Analisis Data.....	24
BAB II PROFIL DESA TANJUNG KERANJANG DAN PKK.....	26
A. Profil Desa Tanjung Keranjang	26
B. Profil PKK Tanjung Keranjang	51
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	64
A. Strategi Pemberdayaan PKK	77
B. Kendala PKK dalam Pemberdayaan Perempuan.....	91
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
PEDOMAN WAWANCARA.....	104

LAMPIRAN 107

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Deskripsi Informan.....	22
Tabel II.1	Anggota BPD Tanjung Keranjang	28
Tabel II.2	Daftar Kepala Desa Tanjung Keranjang.....	30
Tabel II.3	Batas Desa Tanjung Keranjang.....	33
Tabel II.4	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel II.5	Penduduk Berdasarkan Usia	36
Tabel II.6	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel II.7	Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	39
Tabel II.8	Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Keranjang.....	43
Tabel II.9	Struktur BPD Tanjung Keranjang.....	47
Tabel II.10	Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanjung Keranjang.....	49
Tabel II.11	Struktur Kepengurusan PKK	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di desa selama ini masih memfokuskan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mengandalkan investasi besar, namun kurang mengikutsertakan rakyat kecil sebagai subyek dan bagian utama dari pembangunan (Haryono, 2020: 282). Hal ini dilatari oleh konstruksi berpikir dari penganut paradigma orientalis-modernis yang menganggap bahwa desa adalah situs kebodohan, kemandegan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Oleh karena itu, bagi penganut paham ini, untuk merubah desa, maka strategi perubahan yang mesti diusung adalah modernisasi, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi (Sutoro Eko, 2017: 9).

Paradigma pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi pada gilirannya meminggirkan pembangunan sosial. Pembangunan sosial dianggap sebagai sesuatu yang bersifat residual (sisa-sisa dari pertumbuhan ekonomi). Padahal, pembangunan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi dan kedua elemen ini terjalin kelindan satu sama lain. Absennya perhatian pada pembangunan sosial mengakibatkan terjadinya eksklusi pembangunan pada masyarakat bawah, rakyat miskin, dan kaum rentan. Mereka mengalami

ketertutupan akses serta tertinggal dalam setiap proses pembangunan (Haryono, 2020: 282).

Kaum perempuan merupakan salah satu bagian dari kaum rentan ini. Kaum perempuan desa adalah komponen kelompok warga desa yang rentan dipinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini dilatari oleh budaya patriarki yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat yang membentuk dan memposisikan perempuan adalah masyarakat nomor dua. Eksistensi perempuan mencoba untuk menjalankan peranan publik melalui partisipasi. Namun, tetap saja kebanyakan hanya ditempatkan sebagai formalitas belaka. Bahkan, pekerjaan perempuan seringkali dikategorikan sebagai “pekerjaan gratis”. Artinya, pekerjaan yang tidak bernilai atau kurang bernilai secara finansial. Pekerjaan ini lebih bersifat pekerjaan mengasuh, melayani masyarakat, pekerjaan pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Dengan kenyataan seperti ini, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan agar dapat terlibat dalam pembangunan desa. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan yaitu melalui pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan diasumsikan bahwa jika ingin meningkatkan kapasitas perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk memperoleh akses pada pelayanan publik dan untuk merubah nasibnya sendiri. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja

sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek (pelaku aktif), sebagai orang yang merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka (Pratama, 2013: 12).

Pemberdayaan digunakan sebagai model pendekatan pembangunan alternatif dengan memberikan otonomi kepada masyarakat. Melalui otonomi tersebut, akan terbangun kebiasaan masyarakat untuk memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang terkait dengan dirinya. Pemberdayaan akan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Purnasari, 2014).

Pemberdayaan akan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya. Pemberdayaan juga akan membuat perempuan dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk membuat perempuan memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya baik itu sumber daya ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dengan begitu, perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuannya dan konsep diri (Novian, 2010: 43). Jadi, pemberdayaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar perempuan adalah melalui pengorganisasian. Hal ini sejalan dengan anjuran yang disampaikan oleh penganut paham strukturalis-radikalis. Penganut paham strukturalis-radikalis memandang bahwa desa adalah situs ketimpangan, penindasan, penghisapan elit terhadap kaum proletarat. Oleh karena itu, untuk merubah desa, maka mereka mengusung ide yaitu mendidik dan mengorganisir rakyat (Sutoro Eko, 2017: 9). Pengorganisasian dianggap sebagai langkah paling konkret untuk dapat memberdayakan masyarakat (terutama perempuan) itu secara lebih baik.

Salah satu organisasi yang berikhtiar untuk memberdayakan kaum perempuan di desa adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan dapat membina keluarganya. PKK adalah gerakan pembangunan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sebagai sebuah organisasi, PKK diharapkan menjadi wadah potensial dan motor penggerak pembangunan khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga. Singkatnya, PKK adalah sebuah organisasi yang berbasis pada keluarga yang dapat digunakan ujung tombak pembangunan (Nurdewanto, dkk, 2015: 100).

PKK merupakan organisasi masyarakat yang diperuntukkan bagi kaum perempuan agar dapat mengembangkan dirinya di dalam masyarakat (Arisandi 2015: 1887). Melalui pendapat ini dapat disimpulkan bahwa PKK adalah organisasi yang khusus dibentuk untuk memberdayakan kaum perempuan agar dapat mengembangkan dirinya di dalam lingkungan masyarakat. Jadi, PKK merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang telah dilegalkan oleh pemerintah untuk memberdayakan perempuan.

PKK lahir dari keputusan pemerintah untuk menghidupkan dan mengelompokkan organisasi perempuan di bawah departemen dalam federasi. PKK adalah organisasi yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah departemen. Kehadiran PKK selain diharapkan mampu membawa keluarga pada kondisi sejahtera dan mandiri, juga mampu membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarki, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan.

PKK merupakan mitra pemerintah. Keberadaan PKK dapat mendukung dan membantu kinerja pemerintah desa terutama dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat terutama bagi kaum perempuan. PKK dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Indonesia. Oleh karena itu, PKK perlu diberi kesempatan untuk terlibat dalam agenda pembangunan.

Dalam buku *Regulasi Baru, Desa Baru*, Sutoro Eko (2015: 82) menjelaskan bahwa PKK merupakan bagian dari institusi korporatis yang dibentuk oleh pemerintah di ranah desa. Sebagai bagian dari institusi korporatis, PKK merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh negara secara seragam pada masa Orde Baru hingga sekarang. Nilai-nilai yang terkandung dalam PKK adalah harmoni dan partisipasi. Sementara itu, sebagai bagian dari institusi korporatis, PKK mempunyai tiga (3) tujuan, yaitu: (1) kontrol dan kanalisasi kepentingan masyarakat secara tunggal dan seragam; (2) sebagai wadah pemberdayaan dan partisipasi; serta (3) untuk melayani program-program pemerintah serta mengambil dan memanfaatkan dana (BLT) dari pemerintah.

PKK, dari dulu hingga sekarang tetap eksis, sebagai organisasi korporatis yang hierarkis dari tim penggerak PKK Pusat yang dipimpin oleh Istri Menteri Dalam Negeri, kemudian turun ke PKK Provinsi yang dipimpin oleh istri Gubernur, PKK Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Istri Bupati/Wali Kota, PKK Kecamatan yang dipimpin oleh Istri Camat, dan sampai PKK Desa yang dipimpin oleh Istri Kepala Desa. Jadi, PKK dianggap sebagai wadah yang mampu mengakomodir semua kebutuhan kaum perempuan.

Salah satu desa yang masih mengandalkan organisasi PKK adalah Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan di Desa

Tanjung Keranjang. Dalam rangka memberdayakan perempuan di Desa Tanjung Keranjang, PKK melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pembangunan non-fisik. Berdasarkan hasil observasi dari Ketua PKK, diketahui bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PKK Desa Tanjung Keranjang adalah pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari benang wol, pelatihan mengayam keranjang sayur, pelatihan pembuatan bakul dan saung.

Meskipun demikian, terdapat dua faktor yang menghambat kegiatan PKK di Desa Tanjung Keranjang yaitu: *Pertama*, keterbatasan dana. Seperti yang telah disinggung di muka, pada dasarnya PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah secara seragam dan hierarkis di ranah desa. Dengan begitu, salah satu sumber dana PKK berasal dari Pemerintah Desa. Artinya, Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk dana kepada PKK sehingga organisasi ini dapat berfungsi secara maksimal dalam melakukan pemberdayaan perempuan. Dengan kata lain, ketersediaan dana yang memadai menjadi stimulus bagi PKK dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

Namun, kenyataan yang terjadi pada PKK di Desa Tanjung Keranjang mengalami keterlambatan pencairan dana sehingga program yang telah direncanakan juga mengalami hambatan. PKK di Desa Tanjung Keranjang mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya berupa dana dari Pemerintah Desa Tanjung Keranjang. Akibatnya, PKK di Desa Tanjung Keranjang menjadi

kurang efektif karena keterlambatan pencairan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan.

Kedua, manajemen waktu. Selain terkendala keterlambatan pencairan dana, PKK di Desa Tanjung Keranjang menjadi terhambat karena baik pengurus maupun kadernya belum mampu memanage waktu dengan baik. Baik pengurus maupun kader, belum bisa membagi waktu untuk mengurus kehidupan rumah tangga dan mengurus kehidupan organisasi. Pengurus maupun kader PKK terlampau berkonsentrasi untuk mengurus rumah tangga seperti mengurus bayi atau berkebun ketimbang mengurus kegiatan PKK. Akibatnya, hingga saat ini PKK hanya diurus oleh Ketua dan Bendahara.

Dari masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK. Oleh karena itu, penelitian ini secara tegas hendak mengungkap “Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi PKK dalam pemberdayaan perempuan di Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi PKK dalam pemberdayaan perempuan di Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan studi-studi tentang mengenai emansipasi perempuan dan dinamika lembaga kemasyarakatan di desa.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang emansipasi perempuan dan pengorganisasian masyarakat serta mampu memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa Tanjung Keranjang guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan gender.

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Secara sederhana, pemberdayaan perempuan merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada upaya penghapusan subordinasi perempuan. Hal ini berarti bahwa terdapat tuntutan untuk kesamaan hak ekonomi, hak-hak resmi yang tidak diskriminatif, dan hak-hak reproduksi untuk dimasukkan di dalam setiap agenda pembicaraan publik. Jadi, pemberdayaan perempuan merupakan upaya memperbaiki posisi perempuan yang berlandaskan pada upaya-upaya penghapusan subordinasi perempuan.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, terdapat lima tingkat pemerataan, yaitu: *Pertama*, pemerataan tingkat kesejahteraan. Kalau pada awal, kelompok ini ingin diberdayakan tetapi tidak punya aset terhadap ekonomi, tidak punya peluang pada upaya meningkatkan kemampuannya di dalam perekonomian, tidak sejahtera, maka tentu tidak mungkin kita bisa mengangkat mereka dari penderitaannya.

Kedua, pemerataan akses. Pemerataan akses yaitu meningkatkan kemampuan perempuan masuk ke sektor-sektor untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kesempatan bekerja, mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik yang sama kedudukannya dengan laki-laki. Kalau akses itu sudah diperoleh, maka langkah berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran.

Ketiga, pemerataan kesadaran. Kalau kesadaran itu muncul, maka diharapkan kaum perempuan itu bisa memperbaiki sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan gender perempuan ini. Setelah penyadaran diperoleh, maka tingkat berikutnya adalah peningkatan dan pemerataan partisipasi aktif.

Keempat, pemerataan partisipasi. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai objek dari pembangunan tetapi ikut serta melakukan perencanaan, ikut serta melaksanakan dan ikut serta mengevaluasi program-program yang ditimpakan padanya.

Kelima, pemerataan penguasaan. Pemerataan penguasaan yaitu di mana partisipasi perempuan pada tingkat keputusan ini tentunya memberikan dampak pada pemberdayaan dan apabila partisipasi ini digunakan, maka akses mereka terhadap sumber-sumber ekonomi akan menjadi lebih baik serta menjamin pemerataan terhadap akses sumber dan pembagian manfaat. Kontrol atau penguasaan perempuan terhadap pengambilan keputusan ini seringkali mengalami hambatan bukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan perempuan itu mengambil keputusan, tetapi hegemoni budaya seringkali menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan (Saptandari, 1999: 35-36).

Setelah memahami konsep pemberdayaan perempuan, selanjutnya peneliti akan menguraikan strategi pemberdayaan perempuan. Dalam rangka menjelaskan strategi pemberdayaan perempuan, maka peneliti akan

menguraikan konsepsi strategi. Uraian tentang konsepsi strategi merupakan pintu masuk untuk memahami konsep strategi pemberdayaan perempuan.

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia*. Istilah ini berarti “*the art of the general*” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan (Pearce dan Robinson, 2014: 4). Karl Von Clausewitz sebagaimana dikutip oleh Umar (2000: 31) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan tentang pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, pada dasarnya, strategi merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Ahimsa Putra (1988), strategi merupakan pola-pola yang dibentuk oleh berbagai usaha yang direncanakan oleh manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Strategi muncul dari interpretasi manusia dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu atas lingkungan atau situasi yang dihadapi. Jika dipahami seperti itu, maka strategi dapat dipahami sebagai tindakan yang menyesuaikan diri terhadap reaksi ataupun lingkungan yang terjadi, baik di situasi yang disadari ataupun yang tidak disadari. Dengan demikian, strategi dapat dipahami sebagai seni seseorang maupun organisasi memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai

sasaran lewat cara-cara yang lebih efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang diharapkan.

Sementara itu, strategi pemberdayaan adalah seni atau pola-pola seseorang atau kelompok yang dibentuk meningkatkan daya dan kuasa seseorang atau kelompok untuk mencapai kemandirian. Dengan kalimat lain, strategi pemberdayaan adalah cara yang ditempuh oleh seseorang maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatannya sehingga menjadi mandiri. Berikut ini akan diuraikan macam-macam strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife.

Menurut Jim Ife (2008: 510), terdapat tiga strategi dalam mencapai pemberdayaan, yaitu: *Pertama*, pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan mengembangkan struktur-struktur dan lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Menggunakan kebijakan ekonomi untuk mengurangi pengangguran dapat dilihat sebagai pemberdayaan dalam konteks bahwa hal ini meningkatkan sumber daya, akses, dan kesempatan bagi masyarakat. Memberikan sumber daya yang cukup dan aman kepada rakyat juga merupakan strategi pemberdayaan yang penting.

Kedua, pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. Tetapi, ia menekankan pendekatan aktivis dan berupaya untuk memungkinkan masyarakat meningkatkann kekuasaannya melalui bentuk aksi langsung atau dengan memperlengkapi mereka agar lebih efektif dalam arena politik.

Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran. Pendidikan dan penyadaran menekankan pentingnya suatu proses edukatif dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Hal ini berarti bahwa memasukan gagasan-gagasan peningkatan kesadaran, membantu masyarakat memahami struktur operasi, memberikan masyarakat kosakata dan keterampilan untuk bekerja menuju perubahan yang efektif dan seterusnya.

Adapun model pemberdayaan PKK, yaitu: *Pertama*, penyadaran. Sasaran pemberdayaan adalah kaum perempuan sebagai masyarakat yang kurang mampu karena mengalami eksklusi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi PKK memberikan pencerahan dengan menyadarkan bahwa kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan mampu menghadapi masalahnya sendiri. Organisasi PKK harus memberikan motivasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kedua, pengkapasitasan. Pengkapasitasan terdiri dari tiga jenis yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dengan restrukturisasi organisasi sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam perubahan yang dilakukan. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membuat “aturan main” di dalam organisasi yang berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya.

Ketiga, pendayaan. Pendayaan dilakukan dengan memberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga kaum perempuan dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan yang lebih baik (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

2. Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang sudah begitu melembaga baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Bahkan kemudian PKK dengan kegiatannya telah merambah hingga ke tingkat dusun dan RT. Agar pengelolaannya efektif, dibentuklah Tim Pembina (TP) PKK di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Tim Pembina PKK bergungsi untuk

mengakomodir dan memfasilitasi berbagai kegiatan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing (Indarwati, 2017: 864).

Pada awalnya, organisasi ini diberi nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang di dalamnya menekankan partisipasi perempuan dan merupakan program pendidikan perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi ini berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Perubahan nama ini dilandasi oleh pemikiran bahwa organisasi ini tidak hanya mendidik kaum perempuan, akan tetapi membina serta membangun keluarga di bidang mental, spiritual, fisik, dan material serta peningkatan sandang, papan, kesehatan, serta mutu dan juga keluarga sejahtera (Haniz dan Marzaman, 2019: 124).

Di sisi programnya, pada awalnya organisasi PKK diarahkan untuk mendorong kemajuan kaum perempuan agar bisa memainkan peran gandanya secara baik, yakni sebagai pengelola keuangan dalam keluarga dan bisa mencari nafkah serta sebagai pelaku pembangunan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pemberdayaan perempuan berkembang juga dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berdesa, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan supaya melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan perempuan dari

budaya patriarki. Dengan demikian, PKK diharapkan mampu untuk menghadirkan kemandirian serta mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga (Pontoh, 2013).

Bergulirnya Reformasi dan disahkannya GBHN pada tahun 1999 oleh MPR serta adanya paradigma baru pembangunan dan semangat Otonomi Daerah, maka kepanjangan PKK kembali berubah menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Dengan perubahan kepanjangan ini, maka tujuan PKK juga berubah. PKK sebagai organisasi yang melibatkan perempuan dan keluarga mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan kesejahteraan keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Jika kesejahteraan keluarga terwujud, maka akan lahir ketenteraman, kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kesejahteraan keluarga merupakan salah satu tolok ukur pembangunan.

Gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang kemudian disingkat gerakan PKK merupakan gerakan nasional yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Gerakan pembangunan masyarakat ini dimulai dari bawah (dari, oleh, dan untuk rakyat) demi terwujudnya keluarga yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, serta mandiri, memiliki kesadaran akan kesetaraan gender, kesadaran hukum dan lingkungan (Permendagri Nomo 1 1 Tahun 2013 Bab 1, Pasal 1, Ayat 5).

Ini berarti bahwa organisasi PKK memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat terutama kaum perempuan.

Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kewenangan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bisa dibilang cukup luas. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKK menasar pada keluarga di pedesaan yang kemudian ditingkatkan dan dikembangkan lagi pada kemampuan mental, spiritual, fisik, dan material. Jadi, pada dasarnya organisasi PKK merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung dan membantu program-program pemerintah. Bentuk dukungan dan bantuan itu berupa menyuplai data berberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, data ibu hamil, bayi, balita, kelahiran, kematian sampai pada kegiatan masyarakat (Hanis dan Marzaman, 2019: 125).

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada upaya pengarusutamaan gender melalui pengakuan akan hak politik, ekonomi, sosial kaum perempuan. Penelitian ini hendak mengungkap pengarusutamaan gender melalui pemerataan suara (*voice*), akses (*access*), dan kontrol (*control*) terhadap perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Singkatnya, penelitian ini memfokuskan diri pada pemberdayaan perempuan melalui pengorganisasian.

Pengorganisasian perempuan merupakan salah satu upaya jangka pendek untuk melawan ketidakadilan gender. Pengorganisasian dianggap sebagai langkah paling konkret untuk memberdayakan perempuan secara lebih baik. Pengorganisasian perempuan merupakan satu langkah pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Salah satu organisasi perempuan yang diyakini dapat meningkatkan partisipasi perempuan di desa adalah organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan begitu, penelitian ini memusatkan perhatian pada pengorganisasian perempuan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan suatu wadah yang dibentuk untuk mengakomodasi kaum perempuan sehingga memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan desa. Selain itu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan bentuk perkumpulan ibu-ibu untuk menampung aspirasi kaum perempuan. Singkatnya, organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan

sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan.

Menurut Sugiyono (2007: 207), pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Fokus penelitian ini adalah strategi PKK dalam pemberdayaan perempuan di Desa Tanjung Keranjang yang meliputi:

1. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan;
2. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik; dan
3. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode dalam meneliti penelitian ini, sebagai suatu metode yang digunakan untuk memberikan pemaparan serta penjelasan terkait kegiatan atau objek yang diteliti, yang berkaitan dengan pengkajian fenomena lain (Denzim dan Lincoln, 2009). Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dimaksudkan guna mendeskripsikan atau memaparkan suatu objek masalah dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai objek penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*) (Sugiyono, 2007: 229).

Fokus penelitian ini adalah Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Unsur masyarakat yang bertugas untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan adalah organisasi PKK. Dengan demikian objek penelitiannya adalah PKK serta segala usahanya dalam memberikan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan bagi kaum perempuan di Tanjung Keranjang.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, pengurus dan anggota PKK, dan masyarakat Desa Tanjung Keranjang. Subjek penelitian ini dipilih karena berhubungan dengan objek penelitian dan diharapkan mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

Subjek penelitian merupakan informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang betul-betul dipilih memiliki kriteria

sebagai informan). Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan topik penelitian strategi PKK dalam pemberdayaan perempuan di Desa Tanjung Keranjang. Adapun iniforman dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa;
- 2) Ketua dan Kader PKK (5 orang); dan
- 3) Masyarakat Desa Tanjung Keranjang (2 orang).

Tabel I.1 Deskripsi Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Keterangan
1	Jeri Martinus	Laki-Laki	40	Kepala Desa
2	Junaida	Perempuan	35	Ketua PKK
3	Maryam	Perempuan	30	Ketua Pokja 1 dan Staf Desa
4	Yunita	Perempuan	32	Sekretaris PKK
5	Urai Yakub	Perempuan	45	Anggota PKK
6	Haryani	Perempuan	51	Anggota PKK
7	Jumiati	Perempuan	36	Masyarakat
8	Ritha Nia Jayanti	Perempuan	25	Masyarakat

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti akan mengadakan pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti. Adapun tujuan observasi adalah mengamati secara langsung kegiatan keseharian manusia, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian yang dilihat dari

prespektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Dalam menentukan hal-hal yang hendak diamati, peneliti harus mengamati kembali kepada masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, dalam hal ini adalah strategi PKK dalam pemberdayaan perempuan di Desa Tanjung Keranjang.

b. Wawancara

Kegiatan wawancara (*interview*) melakukan kegiatan berbicara dan mendengarkan, dan terkadang narasumber atau informan berbicara. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Sebagai peneliti, pewawancara harus memahami tujuan peneliti melakukan wawancara. Dalam wawancara informan tetap menjadi sentral, walaupun narasumber atau informan akan berganti-ganti (Burhan Bungin, 2007). Dalam hal ini, wawancara tersebut dilakukan kepada beberapa narasumber yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua PKK, Sekretaris PKK, Ketua Pokja, anggota PKK, dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dilakukan untuk mengkolerasi data-data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen berupa keterangan mengenai peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini

beberapa dokumentasi berupa data-data yang diperlukan adalah profil desa, profil PKK, dokumen, foto, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Dalam teknik ketiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data, dalam bentuk siklus selama proses penelitian. Untuk lebih jelasnya tiga komponen dalam model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007: 338), yang meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Data Display

Pada proses ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu dengan cara menampilkan dan membuat hubungan variabel agar peneliti lain atau pembaca laporan penelitian mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang perlu di tindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penampilan atau display data yang baik tampak jelas alur pikirnya, adalah merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap peneliti karena dengan display yang baik merupakan satu langkah penting untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan handal.

c. Conclusion Drawing

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia penulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dalam peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan ‘kesepakatan intersubjektif’ atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokkannya yakni merupakan validitasnya.

BAB II

PROFIL DESA TANJUNG KERANJANG DAN PKK

A. Profil Desa Tanjung Keranjang

1. Sejarah Desa

Desa Tanjung Keranjang adalah sebuah desa hasil pemekaran dari Desa Malinau Kota. Desa Tanjung Keranjang berdiri pada tanggal 25 Oktober 2005. Sebelum ditetapkan menjadi desa, Desa Tanjung Keranjang adalah salah satu RT dari Desa Malinau Kota yaitu RT VI Malinau Kota.

Seiring dengan perubahan tata pemerintahan di wilayah Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, dan atas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau serta dukungan dari lapisan masyarakat, Desa Malinau Kota telah dimekarkan menjadi desa definitif, yang terdiri Desa Tanjung Keranjang, Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir (Trans).

Nama Dusun Tanjung Keranjang kala itu, kini menjadi desa definitif yaitu Desa Tanjung Keranjang. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 303 Tanggal 24 Oktober 2005 tentang Pembentukan Desa Definitif hasil pemekaran Desa di Kabupaten Malinau tahun 2005. Keputusan tersebut berlaku sejak 26 Oktober 2005. Dengan demikian, sejak tanggal 26 Oktober 2005 RT VI Tanjung Keranjang berubah secara resmi menjadi Desa Definitif

dengan nama Desa Tanjung Keranjang. Untuk selanjutnya yang dulunya hanya 1 RT dimekarkan menjadi 2 RT.

Setelah dinyatakan dan disahkan menjadi desa definitif, selanjutnya persiapan pembentukan BPD, dengan serangkaian proses Perekrutan Anggota BPD yang baru, mulai dari membuka pendaftaran, penjaringan, penetapan BPD Desa Tanjung Keranjang periode tahun 2006-2012, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malinau tertanggal 18 April 2006 Nomor 205 Tahun 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota BPD Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir, Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau kota.

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan nama-nama anggota BPD pada awal pembentukan Desa Tanjung Keranjang.

Tabel II.1 Anggota BPD Tanjung Keranjang

No	Nama	Jabatan
1	Anim Beran	Ketua
2	Yusak Ivung	Wakil Ketua
3	Silas Liling	Sekretaris
4	Aspuri	Anggota
5	Lewi, SE	Anggota

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021.

Selanjutnya, BPD Tanjung Keranjang membentuk panitia pemilihan Pejabat Sementara Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Pejabat Sementara Kepala Desa telah melaksanakan pembukaan pendaftaran, penjaringan, penetapan calon Pejabat Sementara Kepala Desa.

Akhirnya ditetapkan nama Pjs. Kepala Desa yaitu Bapak Hang Usat dengan masa jabatan tahun 2005-2006.

Selama kepemimpinan Pejabat Sementara Kepala Desa di Desa Tanjung Keranjang telah menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagaimana mestinya. Dukungan dari berbagai pihak, masyarakat dan pemerintah turut memperlancar jalannya Pemerintahan Desa. Kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Malinau Kota. Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan dukungan sepenuhnya kepada desa-desa di Kabupaten Malinau untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sarana lainnya di desa.

Pada Tahun 2006 telah diselenggarakan pemilihan Kepala Desa definitif untuk masa bakti tahun 2006-2012, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malinau tertanggal 1 November 2006 Nomor 509 Tahun 2006 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Malinau Tahun 2006. Maka tugas Pejabat Sementara Kepala Desa telah berakhir, selanjutnya dilanjutkan oleh Kepala Desa Definitif yaitu Bapak Saul Laing.

Pada tahun 2012 Desa Tanjung Keranjang mengalami pergantian kepala desa berdasarkan pemilihan Kepala Desa Periode 2012 - 2018, dan yang terpilih adalah Bapak Untung Kurang. Karena perkembangan kebutuhan

pelayanan pemerintahan desa makin meningkat, serta pertumbuhan jumlah penduduk makin bertambah, maka pada tahun 2012 secara administratif dilakukan pemekaran wilayah 2 RT menjadi 4 RT.

Selanjutnya, setelah masa jabatan Kepala Desa periode 2012-2018 berakhir, sempat terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Tanjung Keranjang tahun 2018 hingga tahun 2019, maka oleh Bupati Malinau, ditunjuklah Sekretaris Camat Malinau Kota Bapak Fatah Dwi Priyono, S.IP. M.Si. sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Tanjung Keranjang hingga dipilih dan dilantiknya Kepala Desa yang baru. Setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa berikutnya dan yang terpilih adalah bapak Jeri Martinus, SE untuk periode 2019-2024.

Saat ini Kantor Kepala Desa Tanjung Keranjang memiliki 7 orang Staf dan 1 orang Sekretaris Desa yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa Tanjung Keranjang.

Tabel II.2 Periodisasi Kepala Desa Tanjung Keranjang

No	Nama	Masa Bakti	Keterangan
1	Hang Usat	2005-2006	Pjs Kepala Desa
2	Saul Laing	2006-2012	Kepala Desa
3	Untung Kurang	2012-2018	Kepala Desa
4	Fatah Dwi Priyono, S.IP. M.Si.	2018-2019	Pjs Kepala Desa
5	Jeri Martinus, SE	2019-2024	Kepala Desa

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa Tanjung Keranjang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovasi serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa. Pernyataan Visi Desa Tanjung Keranjang adalah; “Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Demi Terwujudnya Desa Tanjung Keranjang Yang Maju, Adil, Damai Dan Sejahtera.”

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Tanjung Keranjang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa untuk memantapkan kinerja pemerintahan desa dalam pelayanan kepada masyarakat;

- 2) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya;
- 3) Meningkatkan peran lembaga-lembaga desa dalam pembangunan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur desa;
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa;
- 6) Meningkatkan peran kelompok tani dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- 7) Meningkatkan peran BUMDes dalam perekonomian desa;
- 8) Mengembangkan seni dan budaya masyarakat;
- 9) Meningkatkan peran karang taruna dalam pembangunan desa;
dan
- 10) Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Kondisi Geografis

Desa Tanjung Keranjang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Secara geografis, kondisi Desa Tanjung Keranjang yang sangat menguntungkan karena didominasi oleh wilayah daratan yang luasnya mencapai sekitar $\pm 20.855 \text{ Km}^2$.

Secara administratif Desa Tanjung Keranjang memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

Tabel II.3 Batas Desa Tanjung Keranjang

No	Batas	Desa	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Malinau Hilir	Malinau Kota
2	Sebelah Timur	Desa Seputuk	Sesayap, KTT
3	Sebelah Selatan	Desa Batu Lidung	Malinau Kota
4	Sebelah Barat	Desa Batu Lidung Malinau Kota	Malinau Kota

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021.

Dari tabel di atas diketahui bahwa letak Desa Tanjung Keranjang boleh dibilang cukup strategis karena berada di antara empat desa. Letaknya yang cukup strategis memudahkan Desa Tanjung Keranjang dalam menjalankan berbagai urusan untuk menunjang kemajuan dan perkembangan desa. Dengan keadaan seperti ini, Desa Tanjung Keranjang dapat melakukan kerjasama antardesa untuk mengembangkan pembangunan kawasan desa. Misalnya, membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama desa-desa tetangga.

4. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : ± 7 Km.
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : ± 9 Km.
- c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : ± 7 Km.
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : ± 120 Km.

Data di atas menunjukkan bahwa akses masyarakat Desa Tanjung Keranjang ke pusat kecamatan, pemerintahan kota, ibu kota kabupaten dan ibu kota cukup mudah. Artinya, masyarakat tidak terlalu akan menguras waktu, tenaga, dan biaya yang banyak untuk mengakses tempat-tempat ini. Hal ini juga didukung oleh keberadaan sarana transportasi yang sangat memadai di Desa Tanjung Keranjang. Kemudahan akses seperti ini akan membantu masyarakat Desa Tanjung Keranjang untuk mengurus berbagai kepentingan, baik berkaitan dengan administrasi maupun agenda pembangunan di desa.

5. Kondisi Demografi

a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Desa Tanjung Karang terdiri dari 167 kepala keluarga (KK). Dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2020 perkembangan penduduk di Desa Tanjung Keranjang per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	350	52,47
2	Perempuan	317	47,52
Total		667	100

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa kuantitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dengan kalimat lain, penduduk Desa Tanjung Keranjang didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Dalam tradisi masyarakat suku Dayak di Desa Tanjung Keranjang hampir berimbang perempuan masih dijadikan sebagai masyarakat kelas dua. Hal itu tercermin dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Dalam musyawarah tersebut, laki-laki memainkan peran penting karena mereka dianggap sebagai representasi keluarganya masing-masing. Sementara perempuan bukanlah aktor yang penting dalam pengambilan keputusan sekalipun keputusan tersebut berdampak pada kehidupan mereka. Dengan kalimat lain, kaum perempuan tereksklusi dari forum musyawarah yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Persis, pada titik ini kita dapat mengetahui betapa eksklusifnya paguyuban suku Dayak dalam musyawarah adat.

b. Penduduk Berdasarkan Usia

Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Tanjung Keranjang berdasarkan usia.

Tabel II.5 Penduduk Berdasarkan Usia

No	Umur (Tahun)					Jumlah Penduduk
		Perempuan	%	Laki-laki	%	
1	0-4	22	6.94	21	6	43
2	5-9	37	11.67	36	10.28	73
3	10-14	27	8.51	25	7.14	52
4	15-19	32	10.09	32	9.14	64
5	20-24	22	6.93	38	11.98	60
6	25-29	35	11.04	27	7.71	62
7	30-34	31	9.77	28	8	59
8	35-39	27	8.51	35	10	62
9	40-44	14	4.41	33	9.42	47
10	45-49	18	5.67	22	6.28	40
11	50-54	15	4.73	15	4.28	30
12	55-59	16	5.04	16	4.57	32
13	60-64	4	1.26	5	1.42	9
14	65-69	6	1.89	9	2.57	15
15	70-74	3	0.94	2	0.57	5
16	< 75	8	2.52	6	1.71	14
Jumlah		317	100	350	100	667

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021.

Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa Desa Tanjung Keranjang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat memadai untuk menopang pembangunan desa. Apabila memakai logika penduduk dengan usia produktif (15-60 tahun), maka penduduk usia produktif Desa Tanjung Keranjang berjumlah 456 jiwa (68%) dengan rincian penduduk berjenis kelamin perempuan dengan usia produktif berjumlah 210 jiwa (31,48%) dan penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan usia produktif berjumlah 246 jiwa (36,88%).

Dengan formasi seperti ini, maka cita-cita untuk menjadikan Desa Tanjung Keranjang sebagai entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Desa Tanjung Keranjang perlu mengembangkan pola pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pola pembangunan yang menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi kegiatan. Singkatnya, Pemerintah Desa Tanjung Keranjang menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

c. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan jumlah penduduk Desa Tanjung Keranjang berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel II.6 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	83	12,44
2	Tidak Tamat SD	33	4,94
3	Belum Tamat SD	74	11,09
4	Tamat SD/ sederajat	114	17,09
5	Tamat SMP/ Sederajat	89	13,34
6	Tamat SMA/ sederajat	174	26,08
7	Tamat D-I/II	6	0,89
8	Tamat D-3/ sederajat	25	3,74
9	Tamat S-1/ sederajat	63	9,44
10	Tamat S-2/ sederajat	6	0,89
Jumlah		667	100

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021.

Data di atas menunjukkan bahwa, secara kuantitas, sumber daya manusia di Desa Tanjung Keranjang mempunyai cukup memadai untuk menopang pembangunan desa. Namun, kuantitas ini tidak dibarengi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Keranjang masih sangat rendah.

Desa Tanjung Keranjang didominasi oleh masyarakat yang hanya mengakses pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang berjumlah 174 jiwa atau sekitar 26,08% dari total penduduk. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa di Desa Tanjung Keranjang masih

terdapat 114 jiwa atau 17,09% dari total penduduk, yang hanya mengakses pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Dasar.

Dengan kenyataan ini, maka program pembangunan di Desa Tanjung Keranjang mesti diarahkan pada pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial ini bisa diaplikasikan melalui skema pemberdayaan masyarakat misalnya menelurkan program-program pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pembangunan di Desa Tanjung Keranjang.

d. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan jumlah penduduk Desa Tanjung Keranjang berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian.

Tabel II.7 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Belum/Tidak Bekerja	140	20,98
2	Pelajar/Mahasiswa	196	29,38
3	IRT	101	15,14
4	Petani/Pekebun	73	10,94
5	Pedagang	3	0,44
7	Wiraswasta	13	1,94
8	Buruh Harian Lepas	9	1,34
10	Kepolisian	2	0,29
11	Pegawai Negeri Sipil	49	7,34
12	Karyawan Honorer	18	2,69
13	Karyawan Swasta	47	7,04
14	Pensiunan	3	0,44
15	Lainnya	13	1,94
Total		667	100

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021.

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Keranjang sangat bervariasi. Mata pencaharian yang bervariasi ini menunjukkan bahwa Desa Tanjung Keranjang merupakan salah satu desa sub-urban. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa terdapat 140 jiwa atau sekitar 20,98% dari total penduduk Desa Tanjung Keranjang yang belum bekerja. Hal ini menegaskan bahwa salah satu persoalan dasar yang ada di Desa Tanjung Keranjang adalah pengangguran.

Dengan keadaan seperti ini, maka pembangunan di Desa Tanjung Keranjang mesti diarahkan pada pembangunan sosial melalui skema pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan berarti masyarakat diberi kuasa dan daya agar dapat mengakses dan melibatkan diri dalam setiap agenda pembangunan desa. Hal ini bisa diaplikasikan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, bahkan sampai pada redistribusi sumber daya secara adil dan merata kepada masyarakat.

6. Kelembagaan Desa

a. Struktur Pemerintah Desa Tanjung Keranjang

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi.

Penyelenggara pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warganya (Widjaja, 2003: 3).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun perangkat desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Jadi, kesatuan antara Kepala Desa dan perangkat Desa itulah yang disebut dengan pemerintah desa. Dengan kalimat lain, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Meskipun desa bukan hanya sekadar pemerintahan desa, bukan hanya sekadar pemerintah desa serta bukan hanya sekadar kepala desa, tetapi kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya, kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus

melindungi, mengayomi, dan melayani warga masyarakat (Sutoro Eko, 2014: 158). Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pemimpin struktur pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan perangkat desa.

Struktur organisasi pemerintah menggambarkan tentang pembagian kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab, baik kepada unit-unit kerja maupun perorangan dalam organisasi pemerintahan desa. Selain itu, struktur organisasi juga menggambarkan tata kerja yang memberi kejelasan alur perintah, koordinasi, dan tanggung jawab baik secara hierariki-vertikal maupun relasi-horizontal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menentukan secara implisit tentang struktur organisasi tersebut yang tergambar dari ketentuan mengenai: (1) kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa; dan (2) susunan perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis. Meskipun demikian UU Nomor 6 Tahun 2014 tidak menentukan secara eksplisit mengenai struktur organisasi pemerintah desa, tetapi mendelegasikan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada peraturan pemerintah.

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan struktur Pemerintah Desa Tanjung Keranjang.

Tabel II.8 Struktur Pemerintah Desa Tanjung Keranjang

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Jeri Martinus, SE
2	Sekretaris Desa	Iwan Kurnia Chandra, S.Ip
3	Kaur Keuangan	Toriana Rahayu
4	Kaur Tata Usaha & Umum	Maryam Kirung
5	Kaur Perencanaan	Agusten, S.Pd.K
6	Kasi Pelayanan	Fredy Philipus
7	Kasi Pemerintahan	Ping, S.Th.
8	Kasi Kesejahteraan	Noni, S.Pd.K

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021.

Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Keranjang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, dan Kepala Seksi Pemerintahan. Berikut adalah tugas dan fungsi Pemerintah Desa Tanjung Keranjang.

1) Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Saat ini, Kepala Desa Tanjung Keranjang dijabat oleh Bapak Jeri Martinus, SE. Sebagai Kepala Desa, Bapak Jeri Martinus bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut: *Pertama*, menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. *Kedua*, melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. *Ketiga*, pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. *Keempat*, pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, Karang Taruna. *Kelima*, Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2) Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Saat ini, Sekretaris Desa Tanjung Keranjang dijabat oleh Bapak Iwan Kurnia Chandra, S.IP. Sebagai Sekretaris Desa, Bapak Iwan Kurnia Chandra bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang

administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut: *Pertama*, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. *Kedua*, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. *Ketiga*, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. *Keempat*, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3) Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi sebagai berikut: *Pertama*, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan perangkat desa, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. *Kedua*, Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. *Ketiga*, Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4) Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala Seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut: *Pertama*, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,

menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. *Kedua*, Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, Kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. *Ketiga*, Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melakukan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

b. Struktur BPD Tanjung Keranjang

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan struktur BPD Tanjung Keranjang.

Tabel II.9 Struktur BPD Tanjung Keranjang

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Jhonidy Awe
2	Wakil Ketua	Marsudi
3	Sekretaris	Faron
4	Anggota	Jhony Usat
5	Anggota	Lia Margarita

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021.

Dalam menjalankan tugas, Kepala Desa bersama Perangkat Desa akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan BPD. BPD merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan institusi demokrasi perwakilan desa. Tetapi, ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR.

Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa. Itu berarti bahwa BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Itu juga berarti bahwa fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD berkedudukan sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. BPD juga menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta

menyelenggarakan musyawarah desa. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa BPD mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Sedangkan fungsi politik BPD terdiri dari: *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. *Ketiga*, menyelenggarakan musyawarah desa.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanjung Keranjang

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan macam-macam Lembaga Kemasyarakatan di Desa Tanjung Keranjang.

Tabel II.10 LKD Tanjung Keranjang

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	RT	4
2	PKK	1
3	Karang Taruna	1
4	LPMD	1
5	Lembaga Adat Kenyah Umalasan	1
6	Posyandu	1
7	KKBBT	1
8	Sanggar Tari Bangen Tawai	1
Total		11

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Desa Tanjung Keranjang mempunyai tiga jenis institusi atau lembaga kemasyarakatan yaitu institusi parokhial, institusi asli, dan institusi korporatis.

Pertama, institusi parokhial. Institusi parokhial adalah sebuah institusi asli di ranah desa yang terbentuk dan memiliki ikatan sosial (*social bonding*) berdasar kesamaan suku, agama, aliran, kerabat, dan unsur-unsur bawaan lain. Paguyuban Keluarga Besar Bangen Tawai dan Sanggar Tari Bangen Tawai merupakan bagian dari institusi parokhial ini. Organisasi semacam ini tidak bisa dikategorikan sebagai organisasi masyarakat sipil karena tidak berorientasi pada kepentingan public, melainkan berorientasi ke dalam (*inward looking*) yang mendefinisikan secara jelas siapa anggota dan bukan anggota. Mereka berupaya membangun solidaritas internal atau tolong-menolong diri mereka sendiri (*self help*) dengan mengutamakan nilai-nilai kerukunan, persabatan, persaudaraan, dan kebersamaan di antara mereka sendiri.

Kedua, institusi asli. Institusi asli (*indigenous institution*) merupakan institusi yang berbasis pada adat. Pengaruh adat jauh lebih kuat dari pada pengaruh pemerintah dan agama. Lembaga Adat Kenyah Umalasan termasuk dalam institusi asli ini. Mereka memiliki *self-governing community* yang memiliki pranata dan kearifan lokal, yang mengutamakan keteraturan dan keseimbangan: *social order*, *ecological order*, dan *spiritual*

order. Mereka juga memiliki tradisi demokrasi komunitarian, yang mengutamakan kebaikan bersama dengan model pengambilan keputusan secara deliberatif melalui institusi asli. Institusi asli mengedepankan emansipasi dalam merawat harmoni sosial dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan tetapi tidak terhadap isu-isu publik kekinian. Mereka juga melakukan eksklusi terhadap kaum perempuan dan rakyat kecil yang tidak punya “tanah” dan “darah”, sekaligus eksklusi terhadap orang lain yang berbeda.

Ketiga, institusi korporatis. Institusi korporatis adalah institusi yang dibentuk oleh negara di ranah desa. Institusi seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, LPMD, dan Posyandu termasuk dalam institusi korporatis ini. Institusi-institusi ini merupakan penerima manfaat dari program pemerintah. Institusi-institusi ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah/negara dalam menjalankan tugas-tugas administratif untuk mengontrol penduduk dan tanah. Berbeda dengan institusi asli dan parokhial yang kaya dengan *social bonding* yang eksklusif, institusi korporatis memiliki *social bridging* inklusif yang melampaui batas-batas agama, suku, dan kerabat. Namun, ketiga institusi ini tetap eksklusif secara vertikal, yakni melakukan terhadap kaum perempuan, miskin, dan kaum marginal lainnya. Ketiganya juga miskin jaringan sosial yang berorientasi keluar (*outward looking*).

B. Profil PKK Tanjung Keranjang

1. Latar Belakang

PKK adalah salah satu wadah yang telah mampu menggerakkan serta membangkitkan kemampuan perempuan sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna membutuhkan, menghimpun, mengarahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. PKK bertujuan memberdayakan keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan harus tampil di depan untuk memberikan motivasi serta dukungan yang kongkrit kepada masyarakat.

Tim Penggerak PKK berperan sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan. Tim Penggerak PKK Desa dapat menyesuaikan dan mengembangkan lebih lanjut dengan muatan lokal sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan yang nyata di desanya masing-masing dengan mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di desa secara optimal.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan struktur kepengurusan PKK di Desa Tanjung Keranjang.

Tabel II.11 Struktur Kepengurusan PKK

No	Nama	Jabatan
1	Junaida, A.Md	Ketua
2	Bulan Merang	Wakil Ketua
3	Yunita	Sekretaris
4	Nataliya Abat	Wakil Sekretaris
5	Webiyanti	Bendahara
6	Meri Usat	Wakil Bendahara
7	Maryam Kirung	Ketua Pokja 1
8	Noni, S.Pd.K	Ketua Pokja 2
9	Toriana Rahayu	Ketua Pokja 3
10	Agustini Istarita	Ketua Pokja 4
11	Ping, S.Th	Ketua Dasawisma ASTER
12	Mailen Timotius	Ketua Dasawisma KENANGA
13	Sukiswanti	Ketua Dasawisma TERATAI
14	Neneng	Ketua Dasawisma KIRAY
15	Sarah Arem	Ketua Dasawisma DAHLIA
16	Oktavia Leny Marlina	Ketua Dasawisma ANGGREK
17	Robika Lian	Ketua Dasawisma MELATI
18	Baun Saul	Ketua Dasawisma MAWAR

Sumber: Profil PKK Tanjung Keranjang Tahun 2021.

2. Kegiatan PKK

a. Kegiatan umum Keluar

Secara umum kegiatan Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Keranjang dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK sudah cukup baik dimana pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan Program kerja Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Tanjung Keranjang terbagi menjadi 4 (empat) RT, maka pelaksanaan kegiatan lebih di pusatkan pada pembinaan Kader-kader di PKK RT setempat. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) Memberikan penjelasan tentang 10 program pokok PKK Administrasi PKK Desa;
- 2) Menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh PKK Kecamatan Malinau Kota; dan
- 3) Mengikut sertakan kader-kader PKK Desa dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh TP PKK Kecamatan Malinau Kota.

b. Kegiatan Umum ke Dalam

- 1) Mengadakan rapat pengurus TP PKK Desa Tanjung Keranjang; dan;
- 2) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dengan permasalahannya.

c. Kegiatan Pimpinan/Ketua

- 1) Memimpin dan melaksanakan kegiatan Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Keranjang. Sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PKK RT dan kegiatan Dasawisma;
- 2) Menurunkan kebijakan Tim Penggerak PKK Kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi setempat;

- 3) Menghadiri rapat dan undangan yang diadakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan, PKK Kabupaten dan Dinas terkait lainnya; dan
- 4) Menghadiri kegiatan penyuluhan/sosialisasi yang di adakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan, TP.PKK Kabupaten dan Dinas terkait lainnya.

d. Kegiatan Wakil Ketua

- 1) Meghadiri undangan dan pertemuan apabila ketua berhalangan hadir sesuai dengan disposisi ketua;
- 2) Memonitoring segala kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretaris maupun kelompok kerja (POKJA) dan Dasawisma; dan
- 3) Mendampingi kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretaris, Pokja dan Dasawisma RT baik kegiatan di dalam maupun di luar.

e. Kegiatan Unit Kerja

1. Sekretariat

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PKK, peran serta sekretaris merupakan motor pergerakan, dimana administrasi yang tertib, lengkap dan baik merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan untuk menunjang keberhasilan PKK.

a) Bidang Sekretaris

- 1) Menyusun/merencanakan kebutuhan kantor TP PKK Desa Tanjung Keranjang;

- 2) Mengerjakan dan mengonsep surat yang akan dikirim sebagai surat keluar termasuk surat keputusan, mandat/kuasa, surat penghargaan dan lain;
 - 3) Menertibkan arsip atau file surat-surat sesuai dengan bidangnya;
 - 4) Menyusun notulen rapat pengurus TP. PKK Desa Tanjung Keranjang;
 - 5) Pelaporan, evaluasi, dan monitoring (PEM) dalam pelaksanaan dan tindak lanjut program; dan
 - 6) Memberikan bimbingan atau penjelasan teknis kepada PKK RT.
- b) Bidang Rumah Tangga

Menyusun merencanakan keperluan rumah tangga TP. PKK Desa Tanjung Keranjang, antara lain:

- 1) Pemeliharaan Kantor TP. PKK Desa Tanjung Keranjang beserta seluruh Perlengkapan dan barang-barang inventarisnya; dan
 - 2) Menyiapkan keperluan lain sesuai dengan petunjuk Ketua TP. PKK Desa Tanjung Keranjang apabila ada kegiatan.
- c) Bidang Personalia Pengurus TP. PKK

Surat-surat yang masuk dari Kabupaten, Kecamatan atau Instansi terkait dan surat keluar dari TP. PKK Desa Tanjung Keranjang dari bulan Januari sampai Desember 2021 sebagai berikut: surat masuk 8 buah dan surat keluar 3 buah.

d) Bidang Organisasi

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma yang diselenggarakan bersama kelompok kerja RT dan Kelompok Dasawisma RT;
- 2) Pembinaan pendayaan dan pemberian bimbingan, motivasi serta fasilitas kepada Kader PKK RT dan Dasawisma;
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma yang diselenggarakan bersama kelompok kerja RT.
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus Pokja I sampai 4 yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Malinau Kota dan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Desa
- 5) Selain tugas rutin tersebut di atas Sekretariat juga mendapat tugas insidentil antara lain:
 - a) Menghadiri undangan dan pertemuan sesuai dengan disposisi ketua;
 - b) Menyampaikan dan membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan program-program pokok PKK Desa; dan
 - c) Membuat laporan tahunan atas kegiatan selama 1 tahun dan menelaah laporan dari Tim Penggerak PKK RT setempat.

2. Bendahara

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan 10 Program Pokok Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Keranjang tahun 2021 mendapat bantuan dari APBD Pemerintah Kabupaten Malinau yang disalurkan melalui APBDes Pemerintah Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021.

f. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Desa Tanjung Keranjang sebagai berikut:

- 1) Memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Dasawisma dan PKK RT;
- 2) Menghadiri pertemuan, sosialisai dan penyuluhan yang dilaksanakan di Kecamatan, Instansi/Dinas terkait lainnya;
- 3) Menghadiri kegiatan arisan dan pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- 4) Menghadiri undangan, penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kabupaten dan Dinas terkait lainnya; dan
- 5) Menghadiri Pembinaan 10 Program Pokok PKK oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten di Wilayah Kecamatan Malinau Kota.

1. Kelompok Kerja I (Pokja I)

Penghayatan pengamalan Pancasila dan gotong royong dalam pelaksanaan menumbuhkan kesadaran keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan sosialisasi melalui penyuluhan, pelatihan, dan simulasi terpadu mengenai:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di antara lain undang-undang perkawinan, HAM, PKDRT, TRAFFICKING, perlindungan anak dan narkoba;
- b. Meningkatkan peran ibu/wanita dalam rumah tangga melalui pola asuh anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan perilaku yang baik, berbudi pekerti dan sopan santun sesuai budaya bangsa;
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan penyuluhan akan peningkatan pemahaman orang tua dalam upaya pencegahan penyalagunaan narkoba.

Kegiatan yang dilaksanakan dihadiri dan diikuti oleh Pokja I sebagai berikut:

- a. Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Gerakan masyarakat Hidup sehat dimasa pandemi Covid-19 IMS, TBC, ISPA dan Diare di Desa Tanjung Keranjang tanggal 14 April 2021;

- b. Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Program KB Kesehatan Semester I TA. 2021 Kodim 0910/MLN di Desa Tanjung Keranjang tanggal 28 Mei 2021.

2. Kelompok Kerja II (Pokja II)

Pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kader yang berkualitas dan terampil melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan sumberdaya manusia telah dilaksanakan sebagai kegiatan antara lain:

- a. Mensosialisasikan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat menghasilkan generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berbudaya;
- b. Melakukan Pembinaan kelompok Dasawisma RT untuk Pengembangan UP2K.

Kegiatan yang dilaksanakan dihadiri dan diikuti oleh Pokja II sebagai berikut:

- a. Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Gerakan masyarakat Hidup sehat dimasa pandemi Covid-19 IMS, TBC, ISPA dan Diare di Desa Tanjung Keranjang tanggal 14 April 2021;

- b. Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Program KB Kesehatan Semester I TA.2021 Kodim 0910/MLN di Desa Tanjung Keranjang tanggal 28 Mei 2021; dan
 - c. 12 November 2021 mengikuti kegiatan pelatihan dari bahan benang wol.
3. Kelompok Kerja III (Pokja III)

a. Pangan

Bagi setiap warga Negara Indonesia pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar, maka kualitas dan kuantitasnya akan meningkatkan status gizi, kecerdasan dan kesehatan keluarga.

- 1) Peningkatan pangan sehari-hari dengan mendorong terciptanya sikap dan laku 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang) sesuai potensi Daerah; dan
- 2) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk menunjang usaha agro bisnis, nortikultura, tanaman buah, perikanan, peternakan dan lain-lain untuk meningkatkan produktifitas dan taraf hidup.

b. Sandang

Membudayakan prilaku berbusana sesuai dengan moral budaya bangsa Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri.

c. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kepada warga masyarakat akan pentingnya Rumah Sehat dan layak huni dan meningkatkan pengetahuan keterampilan tata laksana rumah tangga.

Kegiatan yang dilaksanakan, di hadiri dan di ikuti oleh Pokja III sebagai berikut:

- 1) Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Gerakan masyarakat Hidup sehat dimasa pandemi Covid-19 IMS, TBC, ISPA dan Diare di Desa Tanjung Keranjang tanggal 14 April 2021;
- 2) Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Program KB Kesehatan Semester I TA.2021 Kodim 0910/MLN di Desa Tanjung Keranjang tanggal 28 Mei 2021.

4. Kelompok Kerja IV (Pokja IV)

a. Kesehatan

- 1) Memberikan dan peningkatan pengetahuan serta kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan keluarga khususnya ibu Hamil dengan tujuan menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi);
- 2) Melakukan pendataan status gizi kurang terhadap bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta memonitoring pertumbuhan anak

melalui penimbangan bulanan dengan menggunakan KMS (Kartu Menuju Sehat); dan

- 3) Mengatur kehidupan keluarga yang selaras, serasi dan seimbang.

b. Kelestarian Lingkungan Hidup

Pengembangan kualitas lingkungan, pemukiman, kebersihan. Kesehatan dalam rangka terwujudnya kota bersih dan sehat. Kegiatan yang dilaksanakan, di hadiri dan di ikuti oleh Pokja IV sebagai berikut:

- 1) Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Gerakan masyarakat Hidup sehat dimasa pandemi Covid-19 IMS, TBC, ISPA dan Diare di Desa Tanjung Keranjang tanggal 14 April 2021;
- 2) Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Program KB Kesehatan Semester I TA.2021 Kodim 0910/MLN di Desa Tanjung Keranjang tanggal 28 Mei 2021;
- 3) Posyandu Rutin setiap tanggal 3 setiap bulannya (bayi, balita, bumil).

Beberapa kegiatan Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Keranjang yang menonjol, yaitu: a) mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan masing-masing kelompok Dasawisma dan RT; b) melakukan pendataan keluarga bagi setiap warga melalui setiap Dasawisma RT; c) mengadakan latihan dari Bahan Benang Wol; dan d) perawatan kebun toga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil analisis terkait strategi PKK dalam pemberdayaan perempuan, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, PKK menggunakan tiga strategi dalam memberdayakan kaum perempuan, yaitu: pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan, pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, dan pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dilakukan untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya, layanan publik, dan kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat. Strategi ini membuahkan hasil yaitu PKK menggunakan rapat internal untuk mengidentifikasi kebutuhan kaum perempuan dan memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik dilakukan untuk melengkapi perempuan sehingga lebih efektif memberdayakan kaum perempuan. Strategi ini membuahkan hasil yaitu Pemerintah Desa Tanjung Keranjang mengalokasikan sumber daya berupa dana dan peralatan untuk menunjang kegiatan PKK. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran dilakukan untuk meningkatkan keterampilan kaum perempuan.

Strategi ini membuahkan hasil yaitu kaum perempuan mampu mengembangkan keterampilan menganyam, merajut, dan membuat batik.

Kedua, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala bahkan kegagalan yang dialami oleh PKK. Kendala maupun kegagalan itu meliputi kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal yaitu lambatnya pencairan dana oleh Pemerintah Desa Tanjung Keranjang. Sementara itu, kendala internal yaitu anggota PKK kesulitan membagi waktu, keterbatasan pengetahuan dan skill, sikap pasif anggota dalam melaksanakan kegiatan, pemahaman tentang tujuan organisasi belum memadai, dan secara keorganisasian, PKK sudah kehilangan kemandirian karena PKK dibentuk oleh Pemerintah Desa Tanjung Keranjang, bukan atas dasar prakarsa kaum perempuan itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Bagi Pemerintah Desa Tanjung Keranjang

Pemerintah Desa Tanjung Keranjang diharapkan untuk terus menerus memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan kalurahan. Langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Desa Tanjung Keranjang adalah menyeimbangkan pembangunan fisik dan non-fisik sehingga kaum perempuan dapat

berkontribusi lebih maksimal dalam mewujudkan Desa Tanjung Keranjang sebagai entitas yang mandiri, kuat, maju, dan demokratis.

2. Bagi Organisasi PKK

Organisasi PKK diharapkan agar lebih maksimal dalam memberi penyadaran kepada kaum perempuan terkait ketidakadilan dan praktik diskriminasi yang mereka alami. Langkah yang dapat diambil oleh organisasi PKK adalah mengadakan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa Putra, H.S. 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arisandi, Desi. *Peran PKK Di Dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Muara Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2015.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Denzim, Norman K Dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyanto dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko, Sutoro, 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD "APMD".
- Fauzan, Alimah. 2017. *Advokasi Kesehatan bagi Kelompok Marginal Berbasis Data Kesejahteraan Lokal: Pembelajaran Pengorganisasian Komunitas Perempuan Pembaharu Desa Melawan Kemiskinan dan Mengawal Pembangunan Desa*. Dalam Anang Zakaria (Ed.) 2017. *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Hanis, Nikma Wahyuni dan Atika Marzaman. *Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga*. Gorontalo: Universitas Gorontalo, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019.

- Haryono, Tri. *Partisipasi Perempuan Desa Karang Sari dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif*. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keilmiah, Volume IX, Nomor 2, Oktober 2020.
- Haslam, et.al. 1994. *Stereotyping and Social Reality*. UK: Basil Blackwell Limited.
- Ife, Jim. 2008. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practise*. Melbourne: Longman.
- Indrawati, Rizky. *Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Samarinda Utara*. Samarinda: Universitas Mulawarman, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2017.
- Kartasasminta, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kartasasminta, G. 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Malau, Waston. *Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan*. Medan: Universitas Negeri Medan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 6, Nomor 2, 2014.
- Novian, Budhy. *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. 2010.
- Nurdewantoro, Bambang, Eny Yuniriyanti, dan Ririn Sudarwati. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Dasa Wisma PKK*. Malang: Universitas Merdeka, Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015.
- Pearce, John A. dan Richard B. Robinson. 2014. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pierson, J. 2002. *Tackling Social Exclusion*. London and New York: Routledge.
- Pontoh, L. *Peran Perempuan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 2, Nomor 2, 2013.
- Pratama, Crivis. *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho di Lereng Gunung Wilis*. Surabaya: Universitas Airlangga, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013.

- Probosiwi, Ratih. *Desa Inklusif sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 41, Nomor 3, Desember 2017.
- Purnasari, L. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Bagi Aktualisasi Perempuan di Desa Kemanukan, Bagelan, Purworejo, Jawa Tengah*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.
- Sugiarti. 2009. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Cetakan Kedua. Malang: UMM Press.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Rosdakarya.
- Tamanaha, Brian Z. 2004. *On the Rule of Law: History, Politics, and Theory*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Umar, Husein. 2000. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wrihatnolo, R.R. dan R.N Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Alex Media Komputerindo.
- Zadugisti, E. *Stereotipe Peran Gender dalam Pendidikan Anak*. Jurnal Muwazah. 2009.